

**PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN SENGKETA PERTANAHAN
MELALUI UPAYA PAKSA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

SKRIPSI

**Oleh
Alfira Destriannisya
NIM. 05020721028**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfira Destriannisya
NIM : 05020721028
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum
Judul : Problematika Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan
Melalui Upaya Paksa Pada Peradilan TUN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 November 2024

Saya yang menyatakan,



Alfira Destriannisya
NIM. 05020721028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfira Destriannisya
NIM : 05020721028
Judul : Problematika Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan
Melalui Upaya Paksa Pada Peradilan TUN

telah dibenkan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 November 2024

Pembimbing,



Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.

NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfira Destriannisya

NIM. : 05020721028

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Ifa Mutiatul Choiroh, S.H., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji II



Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 16 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hji. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfira Destriannisya
NIM : 05020721028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : alfiradestriannisya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Problematika Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan Melalui Upaya Paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2024

Penulis

(Alfira Destriannisya)

ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara yang diajukan kepadanya. Salah satu sengketa tata usaha negara yang menjadi wewenang PTUN adalah sengketa pertanahan dalam hal administrasi. Apabila dalam amar putusannya majelis hakim memerintahkan suatu kewajiban kepada kepala kantor pertanahan sebagai tergugat maka kepala kantor pertanahan harus melaksanakan kewajiban dalam amar putusan tersebut sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan bahwa tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan melewati waktu 90 hari, maka dapat dikenakan upaya paksa berupa uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif. Namun, pada implementasinya masih banyak putusan PTUN tidak dilaksanakan dan pada saat penelitian ini dilakukan belum dilakukukan eksekusi oleh tergugat. Sehingga dalam hal ini dibentuklah dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana problematika pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan melalui upaya paksa pada PTUN. 2. Bagaimana analisis yuridis pelaksanaan eksekusi putusan pertanahan melalui upaya paksa pada PTUN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam hal ini yaitu mengkaji dan menganalisis beberapa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dan upaya paksa pada peradilan TUN digunakan untuk menganalisis problematika eksekusi putusan sengketa pertanahan melalui upaya paksa pada peradilan TUN.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang melatarbelakangi banyaknya putusan PTUN berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Permasalahan tersebut antara lain belum ada aturan pelaksana mengenai upaya paksa, belum ada badan/lembaga pelaksana upaya paksa pada PTUN, dan rendahnya kepatuhan tergugat dalam melaksanakan putusan PTUN. Berdasarkan problematika tersebut dapat diatasi dengan dibentuknya aturan pelaksana mengenai upaya paksa pada PTUN dengan jenis Peraturan Pemerintah, dibentuknya lembaga pelaksana upaya pada PTUN yang dilakukan oleh juru sita serta mengatur mekanisme upaya paksa agar dapat dilaksanakan sehingga memberikan tekanan kepada tergugat untuk segera melaksanakan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dengan ini memberikan saran kepada pemerintah untuk segera membentuk aturan pelaksana tentang upaya paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara agar upaya paksa dapat diterapkan dengan jelas dan tegas. Serta kepada pejabat TUN sebagai tergugat yang dibebani kewajiban dalam putusan PTUN untuk segera melakukan eksekusi secara sukarela.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 12 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 13 |
| E. Manfaat Penelitian | 13 |
| F. Penelitian Terdahulu | 14 |
| G. Definisi Operasional | 18 |
| H. Metode Penelitian | 21 |
| I. Sistematika Pembahasan | 25 |
| BAB II PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI UPAYA PAKSA PADA PERADILAN TUN | 27 |
| A. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) | 27 |
| 1. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara | 27 |
| 2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara | 27 |
| 3. Objek dan Subjek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara | 29 |
| 4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara | 31 |
| 5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara | 33 |
| B. Upaya Paksa | 35 |
| 1. Pengertian Upaya Paksa | 35 |

| | |
|--|------------|
| 2. Dasar Hukum Upaya Paksa..... | 37 |
| 3. Jenis Upaya Paksa | 38 |
| C. Sengketa Pertanahan | 40 |
| 1. Pengertian Sengketa Pertanahan | 40 |
| 2. Macam Sengketa Pertanahan | 42 |
| D. Teori Efektivitas | 44 |
| BAB III PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI UPAYA PAKSA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA | 47 |
| 1. Belum ada aturan pelaksana mengenai upaya paksa pada PTUN | 56 |
| 2. Belum ada lembaga pelaksana mengenai upaya paksa pada PTUN | 64 |
| 3. Rendahnya kepatuhan badan/pejabat TUN dalam melaksanakan putusan PTUN | 71 |
| BAB IV ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERTANAHAN MELALUI UPAYA PAKSA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA | 80 |
| 1. Dibentuknya peraturan pelaksana upaya paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara | 83 |
| 2. Dibentuknya lembaga pelaksana upaya paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara | 93 |
| 3. Diaturnya mekanisme upaya paksa pada Peradilan Tata Usaha Negara | 95 |
| BAB V PENUTUP | 119 |
| A. Kesimpulan | 119 |
| B. Saran | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 121 |
| LAMPIRAN..... | 130 |

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ujang. "Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *PTUN Palembang* (2008): 1–18.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (June 1, 2018). Accessed October 24, 2024. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/976>.
- Aji, Fellista Ersyta, and Laga Sugiarto. "Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual." *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 1 (September 7, 2018): 46–71.
- Akbar, Muhammad. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (March 24, 2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/16>.
- Alfaridzi, Asep Misbach, Muhammad Hilmi Naufal Aflah, and Najmi Rabbani. "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun (analisis Pelaksanaan Putusan Ptun Pada Kasus Perizinan Pertambangan Pt. Tms)." *Dinamika Hukum* 24, no. 2 (October 27, 2023): 300–315.
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Cetakan I. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ardana, Sofia Tio, and Diki Zukriadi. "Optimalisasi Peran Penegakan Hukum Dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Administratif." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 5 (July 2, 2024): 81–90.
- Asimah, Dewi, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti. "Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood)." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 152–170.
- Azrianti, Seftia, Tuti Herningtyas, Agus Riyanto, and Indra Sakti. "Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *PETITA* 3, no. 2 (December 20, 2021): 272–279.

- Baranyanan, Soeleman. “Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.” *SASI* 23, no. 1 (June 30, 2017): 1–12.
- Boneka, Prildy Nataniel. “Tinjauan Hukum Putusan Ptun Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.” *LEX ADMINISTRATUM* 2, no. 2 (May 30, 2014). Accessed October 4, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4747>.
- Bunga, Marten. “Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 39–49.
- Cecep Cahya Supena. “Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 9, Nomor 2 (Mei 2023): 372–388.
- Dahlan, Khalid, and Anna Erliyana Chandra. “Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (August 23, 2021): 10–25.
- Darmawan, Ade. “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata.” *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1, no. Nomor 2 (Desember 2019): 70–79.
- Direktori Mahkamah Agung. “Putusan Nomor 13/G/2017/PTUN.Sby,” n.d.
- Ecep Nurjamal, SH. *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. EDU PUBLISHER, 2023.
- Habibi, Dani, and Nuruzzaman Ms. “Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peratun Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional.” *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (July 7, 2023): 66–82.
- Habibi, Dani, and Winda Nuryani. “Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN.” *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 5 (October 31, 2020): 300–304.
- Hadjon, Philipus M. “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (March 31, 2015): 51–64.
- Hakim, Calon. “Tugas, Pokok dan Fungsi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara” (n.d.).

- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia" 7, no. 1 (2017).
- Hasibuan, Ahmad Dahlan, and Ferry Aries Suranta. "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Ptun Medan No: 17/G/2000/Ptun-Mdn)." *JURNAL MERCATORIA* 6, no. 2 (December 1, 2013): 133–144.
- Heriyanto, Bambang. "Legal Overview in the Implementation of Dwangsom (force Money) in Administrative Court." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (August 31, 2021): 141–156.
- Hidayat, Taufik, Yos Johan Utama, and Lapon Tukan Leonard. "Pelaksanaan Rehabilitasi Bidang Kepegawaian Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (studi Kasus: Putusan Nomor: 042/G/2015/Ptun.smg Juncto Nomor 100/B/2016/Pt.tun.sby)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 4 (October 30, 2022). Accessed October 9, 2024. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/36137>.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (March 4, 2021): 46–68.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (May 21, 2019): 19–35.
- Jaya, Alwi, and Elvi Susanti. "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara." *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (February 5, 2022): 80–93.
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (July 30, 2022): 115–128.
- Kaunang, Mikha Ch. "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997." *LEX CRIMEN* 5, no. 4 (July 22, 2016). Accessed October 9, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/12815>.
- Khoiriyyah, Nizar Naufal. "Studi Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 6 (June 23, 2022): 776–785.
- Kusmawardi, Ladju, Suteki Suteki, and Aprista Ristyawati. "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan

- Tata Usaha Negara Semarang.” *LAW REFORM* 14, no. 1 (March 29, 2018): 104–114.
- Lianti, Lita, Fiorentina Elfrida Shanty, and Windha Puji Astuti. “Peran Ptun Dalam Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Sebagai Langkah Efektif Penyelesaian Sengketa Tun.” *YUSTISI* 10, no. 2 (June 2, 2023): 76–86.
- Lubna, Lubna. “Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (April 20, 2015). Accessed September 4, 2024. <https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/205>.
- Mahendra, Akbar Ihza, and Syarifuddin Syarifuddin. “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 1 (December 16, 2021): 1–9.
- MH, Dr Ni'matul Huda, SH , M. Hum, R. Nazriyah, SH. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusamedia, 2019.
- M.H.I, Drs Cik Basir, S. H. *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Prenada Media, 2020.
- Muhammad, Rizal Afriansyah. “Problematika Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Muhidin, Asep. “Legal Certainty Regarding the Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force.” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (September 2, 2023): 405–428.
- Murni, Christiana Sri, and Sumirahayu Sulaiman. “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah.” *Lex Librum* 8, no. 2 (June 6, 2022): 183–198.
- Nababan, Agung Kristyanto, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. “Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (May 24, 2022): 314–330.
- Nahak, Alfonsus. “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (June 22, 2023). Accessed September 4, 2024. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>.

- Nainggolan, Sri Cici, and Diki Zukriadi. "Peran Ptun Dalam Melindungi Hak Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Administrasi Negara." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 10 (July 29, 2024): 71–80.
- Nugroho, Muchamad Arief Agung. "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Upaya Paksa." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 1 (July 27, 2020): 22–38.
- Nugroho, Muchamad Arif Agung. "Rekonstruksi Upaya Paksa Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Berbasis Persepektif Revolusi Sosial Dan Industri." *Proceedings of Legal Internasional Conference and Studies*, no. 0 (February 22, 2023). Accessed October 25, 2024. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/isk5/article/view/29773>.
- Nusantara, Muhammad Qabul, and Wahyu Andrianto. "Peran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *PALAR (Pakuan Law review)* Vol. 08, no. No. 04 (Desember 2022): 33–50.
- Pambudi, Yuristyawan, and Wicaksana. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Lex Renaissance* Vol. 3, No. 1 (May 29, 2019): 3.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. "Putusan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Tidak Dipatuhi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara." *Jurnal Saniri* 1, no. 1 (November 22, 2020): 1–17.
- Pramana, I. Gede Aris Eka, I. Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/Ptun.Dps)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (December 17, 2019): 77–81.
- Pratama, I. Wayan Dedy Cahya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (September 15, 2020): 145–149.
- Puspita, Dian S., Osgar S. Matompo, and Moh Yusuf Hasmin. "Peranan Jurusita Pengganti Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2, no. 1 (September 15, 2019). Accessed October 5, 2024. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/702>.
- Putra, F. A. Satria. "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara." *JUSTISI* 7, no. 1 (January 3, 2021): 66–75.

- Putrijanti, Aju, and Lapon Tukan Leonard. "Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (April 23, 2019). Accessed October 25, 2024. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/605>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cetakan II. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Charisma Taufiq Nur. "Problematic Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian." Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2022.
- Rama, Yosef. "Eksekusi Putusan Pengadilan Atas Perkara Pertanahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Borneo Law Review* 2, no. 2 (2018): 125–140.
- Ramadhan, Nurfajrin, and Nila Sastrawati. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (March 31, 2022): 249–261.
- Razy, Fakhruddin. "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara." OSF, February 6, 2021. Accessed September 4, 2024. <https://osf.io/ug8hm>.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rizki, Deanisha Sekar Oristania. "Urgensi Pengaturan Wewenang Juru Sita Dalam Eksekusi Putusan Ptun Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Brawijaya Law Student Journal* (July 25, 2023). Accessed October 5, 2024. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5513>.
- Rohaedi, Edi, Nandang Kusnadi, Bambang Heriyanto, and Nuradi. "Kedudukan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *PALAR (Pakuan Law review)* 9, no. 2 (July 28, 2023): 121–129.
- Salim, Agus. "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (November 20, 2019): 174–187.
- Santoso, Lukman. "Problematica Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (aupb) Dalam Eksekusi Putusan Ptun." *Justicia Islamica* 13, no. 1 (October 19, 2016): 113–134.
- Sari, Leona Putri, and Arif Wibowo. "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Pengadilan Tata Usaha Negara, Hukum, Indonesia, Putusan Pengadilan." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 8, 2023): 59–63.

- Sari, Putri Kemala. "Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (October 29, 2018). Accessed October 4, 2024. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/454>.
- Sari, Tessya Putri Permata. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" (February 5, 2021). Accessed October 4, 2024. <https://osf.io/gcasx>.
- Simanjuntak, Dr Enrico. "Potensi Permasalahan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Sengketa Pertanahan Yang Melibatkan Aset Bumn" (n.d.).
- Simanjuntak, Enrico. "Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 3, no. 2 (2017): 171–188.
- Siregar, Victor Tongam Museka, and Diki Zukriadi. "Wujud Penerapan Uang Paksa Atau Dwangsom Dalam Sanksi PTUN." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 5 (July 1, 2024): 31–40.
- Socawibawa, Nur Indra, and Arif Wibowo. "Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Peradilan, Tata Usaha Negara, Eksekusi Putusan, Efektifitas." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 8, 2023): 45–52.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (May 20, 2016): 661.
- Suhariyanto, Budi. "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 192–211.
- Sujiono, Agus, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Ronny Soplantila. "Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (October 5, 2021): 364–375.
- Sutanto, Very Werson, Aurelius Kasimirus Yori, Andreas Lumme, and Paulus T. T. Padang. "Penyuluhan Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara." *Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (May 30, 2023): 383–394.
- Suyanto, Wulan Febriyanti Putri. "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa." *JURNAL AL TASYRI' IYYAH* (June 19, 2022): 34–47.
- Suyatno, Suyatno Suyatno. "KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M.FRIEDMAN DALAM HUKUM

- INDONESIA.” *IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (July 5, 2023): 197–205.
- Tan, David. “METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM” (2021).
- Wahyudi, Ari. “Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 4, no. 1 (June 25, 2021): 121–145.
- Wahyunadi, Yodi Martono. “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (March 31, 2016): 135–154.
- Widyadnyana, Made Martha, and I. Wayan Suardana. “Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek Dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (August 12, 2019): 1–18.
- Wulan Febriyanti Putri, Suyanto. “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa | Jurnal Al Tasyri’iyah.” *Jurnal Al Tasyri’iyah* Vol. 2 No. 1 (2022): 34–37.
- Yulius, Nfn. “Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia / the Discourse of State Execution Institution in Indonesian Law Enforcement.” *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (April 24, 2018): 11–32.
- Yulius, Yulius. *Problematika Eksekusi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Dan Diskursus Lembaga Eksekusi Negara*. Cetakan Pertama. Lampung: AURA, 2019. Accessed October 4, 2024. <https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/25563/1/Problematika%20Eksekusi.pdf>.
- Yusuf, Muhammad. “Keberlakuan Peraturan Dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksanaannya.” *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (June 19, 2022): 67–86.
- “Aplikasi Monitoring Eksekusi | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.” Accessed September 15, 2024. <https://eksekusi-ptun.djmt.id/>.
- “Aplikasi Monitoring Eksekusi | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.” Accessed October 5, 2024. <https://eksekusi-ptun.djmt.id/>.
- “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) - Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah - Google Books.” Accessed November 6, 2024. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=hfacDwAAQBAJ&oi=fn>

d&pg=PA1&dq=metode+penelitian+hukum&ots=RppWAliqDA&sig=R7SrR4FerYGeS4YN9XKc9x8Hrgk&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20hukum&f=false.

- “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan,” n.d.
- “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” n.d. Accessed December 13, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” n.d.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A